

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan Semester II ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode per 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan periode Semester II TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 285.940.800,00 atau mencapai 600,72% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.47.600.000,00

Realisasi Belanja Negara sampai dengan periode Semester II TA 2017 adalah sebesar Rp. 16.125.822.115,00 atau mencapai 96,62% dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 16.689.224.000,00 (setelah adanya pemotongan anggaran)

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode per 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 46.939.613.830,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 121.332.200,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 46.818.281.630,00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas yang masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 46.939.613.830,00

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 285.940.800,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 15.120.355.219,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. (14.834.414.419,00.). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp. 73.602.490,00 dan Defisit Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(14.833.461.229,00.)

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada periode sampai tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.35.217.134.752,00 ditambah Defisit-LO sebesar

Rp.(14.833.461.229,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.846.900,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.26.553.093.407,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 46.939.613.830,00

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
KARAWANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER II
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2017 DAN
31 DESEMBER 2016 AUDITED**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	285.940.800,00	0,00	102.070.271,00
Jumlah Pendapatan		0,00	285.940.800,00	0,00	102.070.271,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	5.964.268.000,00	5.564.425.573,00	93,30	5.403.024.949,00
Belanja Barang	B.2.2	7.366.211.000,00	7.203.486.637,00	97,79	5.085.810.441,00
Jumlah Belanja Operasi		16.612.343.000,00	11.316.995.901,00	68,12	10.488.835.390,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	3.338.022.000,00	3.337.213.775,00	99,98	1.024.026.700,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	00,00	0.000	0,00	1.177.751.500,00
Belanja Modal Lainnya	B.2.5	20.724.000,00	20.696.130.320	99,87	0,00
Jumlah Belanja Modal		3.358.745.000,00	3.357.909.905,00	99,98	2.201.778.200,00
Jumlah Belanja		16.689.224.000,00	16.125.822.115,00	66,94	12.690.613.590,00

Karawang, 29 Desember 2017
Kepala Balai,

Ir. Tri Susetyo, M.M
NIP 195902111983031022

II. NERACA

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
KARAWANG
NERACA SEMESTER II
PER 31 Desember 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 AUDITED**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0,00	0,00
Persediaan	C.1.2	121.332.200,00	80.885.505,00
Jumlah Aset Lancar		121.332.200,00	80.885.505,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	17.466.992.000,00	17.466.992.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	25.469.122.629,00	8.5250.44.535,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	18.292.967.599,00	18.292.967.599,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	702.025.700,00	702.025.700,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2.596.936450,00	4.240.320,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-12.956.274.324,00	-5.821.870.365,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-4.682.143.871,00	-3.978.826.321,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-71.344.553,00	-54.578.409,00
Jumlah Aset Tetap		46.818.281.630,00	35.135.995.059,00
Jumlah Aset		46.939.613.830,00	35.216.880.564,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.4.1	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	46.939.613.830,00	35.216.880.564,00
Jumlah Ekuitas		46.939.613.830,00	35.216.880.564,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		46.939.613.830,00	35.216.880.564,00

Karawang, 29 Desember 2017
Kepala Balai,

Ir. Tri Susetyo, M.M
NIP 195902111983031022

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
KARAWANG
LAPORAN OPERASIONAL SEMESTER II
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN
31 DESEMBER 2016 AUDITED**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	285.940.800,00	16.420.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		285.940.800,00	16.420.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.564.425.573,00	4.354.954.045,00
Beban Persediaan	D.3	528.874.285,00	518.108.741,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.884.510.083,00	2.249.155.813,00
Beban Pemeliharaan	D.5	888.318.472,00	469.484.930,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.862.290.292,00	3.985.716.883,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.391.936.514,00	770.038.661,00
JUMLAH BEBAN		15.120355.219,00	12.347.459.073,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-14.120.355.219,00	-12.331.039.073,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-14.833.461.229,00	-12.331.039.073,00

Karawang, 29 Desember 2017
Kepala Balai,

Ir. Tri Susetyo, M.M
NIP 195902111983031022

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
KARAWANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEMESTER II
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN
31 DESEMBER 2016 AUDITED**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	35.217.134.752,00	33.742.183.903,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-14.833.461.229,00	-12.331.039.073,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	2.846.900,00	1.727.124.812,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	2.846.900,00	3.812.812,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	0,00	5.419.100,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0,00	1.723.312.000,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	26.553.093.407,00	12.274.777.221,00
EKUITAS AKHIR		46.939.613.830,00	35.418.465.963,00

Karawang, 29 Desember 2017
Kepala Balai,

Ir. Tri Susetyo, M.M
NIP 195902111983031022

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang

Subsektor tanaman pangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan pertanian regional dan nasional. Kontribusi subsektor tanaman pangan tidak hanya terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi yang cukup besar PDB, kesempatan kerja, sumber pendapatan serta perekonomian regional dan nasional. Selama krisis ekonomi subsektor ini telah memperlihatkan ketangguhannya dengan tetap tumbuh positif, sementara sector lainnya mengalami pertumbuhan negative. Subsektor ini menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar.

Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim merupakan risiko yang selalu timbul dan harus diperhitungkan dalam setiap usaha tani. Antisipasi yang tidak memadai terhadap OPT dan perubahan iklim akan mengakibatkan eksplosi OPT, kekeringan dan banjir yang sangat merugikan dan menjadi kendala program pembangunan pertanian. Dalam sistem usaha agribisnis dan ketahanan pangan, perlindungan tanaman merupakan bagian yang penting baik dalam kegiatan budidaya (on farm) maupun di luar kegiatan budidaya (of farm). Oleh sebab itu perlindungan tanaman menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam kegiatan usaha tani.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP No. 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman, kegiatan perlindungan tanaman dilaksanakan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). PHT harus menjwai setiap usaha budiaya tanaman dan pengamanan hasil tanaman, bahkan dalam era perdagangan bebas ini penerapan Sistem PHT menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produk dan jaminan proses produksi yang ramah lingkungan. Peramalan OPT adalah kegiatan yang diarahkan untuk mendeteksi/memprediksi populasi/serangan OPT, kemungkinan penyebaran dan akibat yang ditimbulkan dalam ruang dan waktu tertentu. Peramalan pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan OPT terutama dalam pengambilan keputusan pengendalian yang sesuai dengan prinsip dan penerapan PHT.

Sebagai arah kebijakan dalam pencapaian sasaran, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Jatisari dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura
- b. Pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT
- c. Pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT
- d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem PHT
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT
- h. Pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura
- i. Pengelolaan cadangan bahan pengendali OPT tingkat Nasional
- j. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BBPOPT mempunyai Visi, yaitu “Menjadi Lembaga Terpercaya dan Pusat Pengembangan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Diakui Dunia Internasional”. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian visi, BBPOPT didukung atau memiliki misi-misi sebagai berikut :

- Mengembangkan BBPOPT yang Profesional, Efektif dan Efisien;
- Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas di Bidang Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT;
- Menciptakan Model Peramalan OPT yang Tepat dan Akurat;
- Menciptakan Metode Pengamatan OPT yang Tepat dan Akurat;
- Merakit dan Mengembangkan Teknologi Pengendalian Tepat Guna yang Efektif, Efisien dan Aman;
- Menerapkan dan Mengembangkan Teknologi PHT Spesifik Lokasi;
- Meningkatkan Pelayanan dan Diseminasi Informasi Pengamatan, Peramalan dan Teknologi Pengendalian OPT.

Untuk pelaksanaan operasional dalam mencapai visi dan misi, BBPOPT memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik petugas, petani maupun masyarakat lainnya di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (perlindungan tanaman) dalam rangka pemahaman, pelaksanaan, pemyarakatan dan pelembagaan konsepsi PHT;
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perlindungan tanaman;

- Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sinkronisasi dengan program dan kegiatan perlindungan tanaman antar berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Memberikan dukungan teknologi di bidang pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (P3OPT) kepada pihak pengambil kebijakan dalam pelaksanaan P3OPT dan rujukan proteksi;
- Berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan tanaman pangan khususnya pencapaian dan pertumbuhan produksi pangan nasional khususnya padi, jagung, kedelai dan ubi kayu pada tahun 2015 - 2019

b. Sasaran

- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik petugas, petani maupun masyarakat lainnya di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (perlindungan tanaman) dalam rangka pemahaman, pelaksanaan, pemasyarakatan dan pelebagaan konsepsi PHT;
- Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perlindungan tanaman;
- Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sinkronisasi dengan program dan kegiatan perlindungan tanaman antar berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Terwujudnya dukungan teknologi di bidang pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (P3OPT) kepada pihak pengambil kebijakan dalam pelaksanaan P3OPT dan rujukan proteksi;
- Terwujudnya peran aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan tanaman pangan khususnya pencapaian dan pertumbuhan produksi pangan nasional khususnya padi, jagung, kedelai dan ubi kayu pada tahun 2015 - 2019

Dalam kebijakan Kementerian Pertanian, Kepala BBPOPT ditunjuk sebagai penanggung jawab dan membina Provinsi Riau dalam rangka kegiatan Upsus Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) guna meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Selain itu, beberapa petugas telah ditunjuk sebagai pendamping di tingkat lapangan khususnya untuk Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis dan Kepulauan Meranti, hal ini sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 80/Hk.310/C/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Tim Pendukung Kelompok Kerja Upsus Peningkatan Produksi Pajale melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukung Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan supervisi/monitoring dan pendampingan satuan kerja perangkat daerah pelaksanaan program
- b. Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan (CaLK) Semester II Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - √ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - √ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - √ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 September 2016 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2016 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	5.964.268.000,00	5.964.268.000,00
Belanja Barang	11.534.367.000,00	7.366.211.000,00
Belanja Modal	3.338.021.000,00	3.358.745.000,00
Jumlah Belanja	20.857.380.000,00	16.689.224.000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 285.940.800,00 atau mencapai 600,72% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.47.600.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Periode per 31 Desember 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan penjualan hasil panen	0,00	285.940.800,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	285.940.800,00	0,00

Realisasi Pendapatan TA 2017 pada periode sampai dengan per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan 141,31% dibandingkan dengan pendapatan pada periode per 31 Desember 2016 Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi	Realisasi	%
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	285.940.800,00	118.493.648,00	141,31
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	00
Jumlah	285.940.800,00	277.046.800,00	141,31

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2017 pada periode per 31 Desember 2017 adalah total belanja netto sebesar Rp. 16.125.822.115,00 atau 96,62% dari pagu anggaran belanja sebesar Rp.16.689.224.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.964.268.000,00	5.564.425.573,00	93,30
Belanja Barang	7.366.211.000,00	7.203.486.637,00	97,79
Belanja Modal	3.358.745.000,00	3.357.909.905,00	99,98
Total Belanja Kotor	16.689.224.000,00	16.129.897.463,00	96,65
Pengembalian Belanja Pegawai		4.075.348,00	0.00
Total Belanja	16.689.224.000,00	16.125.822.115,00	96,62

Dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2016, realisasi belanja pada periode per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 641.562.151,00 (4,14%) Hal ini disebabkan antara lain:

- Realisasi belanja modal sampai dengan periode 31 Desember 2017 naik sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi pada periode per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.844.636.835,00 (54,93 %). Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan Peralatan dan Mesin untuk keperluan kegiatan operasional laboratorium dan perkantoran guna kelancaran pelaksanaan kegiatan BBPOPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Belanja Pegawai	5.564.425.573,00	5.662.771.950	-1,77
Belanja Barang	7.203.486.637,00	8.308.214.944	-15,34
Belanja Modal	3.357.909.905,00	1.513.273.070	54,93
Total Belanja	16.125.822.115,00	15.484.259151,00	3,98

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.564.425.573,00 dan Rp. 5.662.771.950,00. Realisasi belanjapegawai pada periode 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.(98.346.377,00) atau (1,77) % dari belanja pegawai pada periode 31 Desember 2016 Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena adanya pegawai yang mutasi dan purna tugas

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.564.425.573,00	5.662.772.551,00	(1,69)
Jumlah Belanja Kotor	5.568.500.921,00	5.662.772.551,00	(1,69)
Pengembalian Belanja Pegawai	4.075.348,00	-601,00	(99,99)
Jumlah Belanja	5.564.425.573,00	5.662.771.950,00	(1,77)

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.203.486.637,00 dan Rp8.308.214.944,00. Realisasi belanja barang pada periode 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.1.104.728.307,00 atau 6,62 % dari belanja barang pada periode 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penghematan anggaran dari semua Pos Kegiatan
2. Sedangkan untuk anggaran belanja barang, baik pada periode sampai per 31 Desember 2017 maupun periode per 31 Desember 2016 tidak ada pengembalian untuk anggaran belanja barang.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.019.469.094,00	470.033.873,00	45,57
Belanja Barang Non Operasional	1.397.205.725,00	1.279.105.900,00	12,68
Belanja Barang Persediaan	1.114.009.262,00	421.986.476,00	120,93
Belanja Jasa	467.835.264,00	1.012.343.955,00	67,46
Belanja Pemeliharaan	342.677.000,00	414.509.330,00	25,07
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.862.290.292,00	4.710.235.410,00	31,29
Jumlah Belanja Kotor	7.203.486.637,00	8.308.214.944,00	10,37
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	
Jumlah Belanja	7.203.486.637,00	8.308.214.944,00	10,37

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.357.909.905,00 dan Rp.1.513.273.070,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.844.636.835,00 atau 54,93% dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pengadaan dari belanja modal peralatan dan mesin untuk keperluan kegiatan operasional laboratorium dan perkantoran guna kelancaran pelaksanaan kegiatan BBPOPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik/Turun %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.357.909.905,00	1.513.273.070,00	54,93
Jumlah Belanja Kotor	3.357.909.905,00	1.513.273.070,00	54,93
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.357.909.905,00	1.513.273.070,00	54,93

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/Turun %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.2.5 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.696.130,00 dan Rp. 4.240.320,00 . Realisasi Belanja Modal Lainnya pada periode 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp16.275.810,00 atau 78,54 persen.disebabkan karena adanya penambahan buku panduan untuk petani.

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	20.696.130,00	4.240.320,00	78,54
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	20.696.130,00	4.240.320,00	78,54

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Tidak ada Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rekening Bank	0,00	0,00
Uang Tunai	0,00	0,00
Jumlah	0.00	0.00

C.1.2 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.121.332.200,00 dan Rp.80.855.505,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	119.498.500,00	79.394.505,00
Bahan untuk Pemeliharaan	277.000,00	960.000,00
Suku Cadang	960.000,00	0,00
Bahan Baku	596.700,00	531.000,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	121.332.200,00	80.885.505,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 audited adalah masing-masing sebesar Rp17.466.992.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	17.466.992.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	17.466.992.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

1. Mutasi transaksi penambahan tanah adalah adanya pembuatan sertifikat sebidang tanah atas nama Pemerintah RI yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini tidak terdapat Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset.
2. Sedangkan mutasi pengurangan adalah adanya proses penghapusan/ pemindahtanganan terhadap asset tanah milik Pemerintah RI, dalam hal ini tidak ada muatsi pengurangan/pemindahtanganan (R.p 0)

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	5.910 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	591.000.000,00
2.	2.130 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	213.000.000,00
3.	8.230 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	823.000.000,00
4.	12.690 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	1.269.000.000,00
5.	21.072 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	2.107.200.000,00
6.	84.166 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	8.416.600.000,00
7.	15.817 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	1.581.700.000,00
8.	428 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	42.800.000,00
9.	1.529 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	152.900.000,00
10.	820 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	82.000.000,00
11.	2.316 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	231.600.000,00
12.	11.544 m ²	Jln Raya Kaliasin Jatisari Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang	1.956.192.000,00
Jumlah			17.466.992.000,00

Nilai saldo Tanah pada Neraca SAIBA sama dengan nilai total KIB tanah pada aplikasi SIMAK-BMN, senilai Rp. 17.466.992.000,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 audited adalah masing-masing sebesar Rp.25.469.122.629,00. dan Rp.8.525.044.535,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2017	8.525.044.535,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	8.525.044.535,00
Pembelian Peralatan dan Mesin	3.252.909.155,00
Transper masuk peralatan dan mesin	13.716.437.319,00
Saldo per 31 Desember 2017	25.469.122.629,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	12.956.274.324,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	12.512.848.305,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi transaksi penambahan ini disebabkan karena adanya pembelian/ penambahan peralatan dan mesin. Mutasi tambah untuk peralatan dan mesin pada periode per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 16.944.078.094,00 dengan rincian saldo awal sebesar Rp. 8.525.044.535,00 Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.232.213.025,00 transper masuk Rp.13.716.437.319,00

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.18.292.967.599,00. Dan Rp.18.292.967.599,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp.702.025.700,00. Dan Rp.702.025.700,00.

C.2.5 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp.17.709.762.748,00 dan Rp9.855.020.907,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	25.469.122.629,00	12.956.274.324,00	12.512.848.305,00
2.	Gedung dan Bangunan	18.292.967.599,00	4.682.143.871,00	13.610.823.728,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	702.025.700,00	71.344.553,00	631.081.147,00
Akumulasi Penyusutan		44.464.115.928,00	17.709.762.748,00	26.754.753.180,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp.68.580.000,00 dan Rp.262.680.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar

Rp.68.580.000,00 dan Rp.262.680.000,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	68.580.000,00	68.580.000,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan	68.580.000,00	68.580.000,00	0,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp.46.939.613.830,00 dan Rp35.217.134.752,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp.285,940.800,00 dan Rp.118.493.648,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	259.165.000,00	75.539.650,00	29,15
Pendapatan Penjualan Lainnya	0	1.200.000,00	-100,
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	293.000,00	20.420.000,00	6969,28
Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	10.225.800	7.333.998,00	71,72
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin		14.000.000,00	-100
Jumlah	285.940.800,00	118.493.648,00	41,44

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan periode per 31 Desember 2017 sebesar Rp.285,940.800,00 terdapat kenaikan dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2016. Kenaikan PNBP periode per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 158.533.152,00 (133,81 %). Sumber PNBP yang diperoleh pada periode per 31 Desember 2017 berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, Penjualan dari hasil Pertaniandan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp.4.331.516.705,00 dan Rp.5.662.771.950,00,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	4.001.352.900,00	4.022.547.380,00	-0,53
Beban Pembulatan Gaji PNS	54.329,00	56.032,00	-3,13
Beban Tunj. Anak PNS	83.447.234,00	84.619.463,00	-1,40
Beban Tunj. Beras PNS	230.874.960,00	237.754.860,00	-2,98
Beban Tunj. Fungsional PNS	230.970.000,00	238.140.000,00	-3,10
Beban Tunj. PPh PNS	7.007.210,00	45.484.121,00	-549,10
Beban Tunj. Struktural PNS	108.915.000,00	101.535.000,00	6,78
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	309.599.940,00	310.480.094,00	-0,28
Beban Tunjangan Umum PNS	96.040.000,00	104.605.000,00	-8,92
Beban Uang Makan PNS	496.164.000,00	517.550.000,00	-4,31
Jumlah	4.331.516.705,00	5.662.771.950,00	-1,77

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beban pegawai sampai dengan periode per 31 Desember 2017 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 98.346.377,- atau 1.77 % dibandingkan beban pegawai pada periode 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai dan purna tugas..

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 446.662.273,00 dan Rp. 518.108.741,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	393.717.885,00	424.450.141,00	-7,8
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	21.579.500,00	6.436.550,00	70,2
Beban Persediaan suku cadang	866.738.972,00	415.861.430,00	52,0

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban persediaan bahan baku	86.453.400,00	149.978.500,00	-73,5
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	72.649.300,00	6.175.400,00	91,5
Jumlah	1.441.139.057,00	1.002.902.021,00	30,4

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beban persediaan sampai dengan periode per 31 Desember 2017 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 219.157.650,- atau (27,46 %) dibandingkan beban persediaan pada periode 30 Juni 2017. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada beban persediaan bahan baku dan konsumsi.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.861.223.995,00 dan Rp2.549.012.574,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	1,099,785,725	956,596,900	32,46
Beban Barang Non Operasional Lainnya	132,640,000	132,354,000	63,54
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	92,950,000	65,600,000	36,51
Beban Honor Output Kegiatan	164,780,000	190,155,00	18,35
Beban Jasa Profesi	142,780,000	234,255,000	32,07
Beban Keperluan Perkantoran	918,933,744	402,044,303	31,39
Beban Langganan Listrik	271,292,941	181,077,740	33,78
Beban Langganan Telepon	4,176,235	6,636,311	28,37
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,585,350	2,389,570	53,02
Beban Sewa	26,300,000	549,043,250	10,24
Jumlah	2.861.223.995,00	2.549.012.574,00	10,91

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beban barang dan jasa sampai pada periode per 31 Desember 2017 menunjukkan kenaikan sebesar Rp312.211.421,00,- atau (10,91 %) dibandingkan dengan beban barang dan jasa pada periode 31 Desember

2017. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan beban bahan, barang non operasional lainnya, honor satker, honor output kegiatan, jasa profasi, keperluan perkantoran, langganan listrik, telepon, dan beban sewa.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. **974.771.872,00** dan Rp. **572.186.480,00** pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	86.453.400,00	149.978.500,00	32,81
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21.579.500,00	6.346.550,00	78,04
Beban Persediaan suku cadang	866.738.972,00	415.861.430,00	7,48
Jumlah	974.771.872,00	572.186.480,00	41,30

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beban pemeliharaan sampai pada periode per 31 Desember 2017 menunjukkan kenaikan sebesar Rp.572.186.480,00 atau (41,30%) dibandingkan dengan beban pemeliharaan pada periode 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dan persediaan suku cadang.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. **2.862.290.292,00** dan Rp. **4.710.235.410,00**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	2.330.768.230,00	3.150.915.539,00	27,59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	115.830.000,00	102.181.000,00	52,07

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	415.692.062,00	1.457.138.871,00	11,90
Jumlah	2.862.290.292,00	4.710.235.410,00	-64,56

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beban perjalanan dinas sampai dengan periode per 31 Desember 2017 menunjukkan kenaikan sebesar Rp.497.752.922,00 atau (25,72 %) dibandingkan dengan beban perjalanan dinas pada periode per 30 Juni 2017. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan beban perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting luarkota

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.391.936.514,00 dan Rp.1.575.072.705,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	703.317.550	675.647.794,00	3,93
Beban Penyusutan Irigasi	9.307.394,00	7.690.669,00	17,37
Beban Penyusutan Jaringan	7.458.750,00	7.458.750,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.671.852.820,00	884.275.493,00	47,11
Jumlah	2.391.936.514	1.575.072.706	34,15

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beban penyusutan dan amortisasi sampai dengan periode per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 816.863.808,00 atau (34,15%) menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi pada periode per 31 Desember 2016

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.46.939.613.830,00 dan Rp.35.217.134.752,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp14.833.461.229,00 dan Rp15.689.904.312,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Pada transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, masing-masing sebesar R. . 2.846.900,00 dan Rp. 2.846.900,00

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.2.846.900,00 dan Rp.2.846.900,00 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0,00
Jumlah	0,00

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.553.093.407,00 dan Rp. 15.365.766.316,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.125.822.115,00
Diterima dari Entitas Lain	(285.940.800,00)
Jumlah	26.553.093.407,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.46.939.613.830,00 dan Rp.35.217.134.752,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian-kejadian penting selama periode dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2016, adanya revisi DIPA Satker BBPOPT TA. 2017 karena pemotongan anggaran, yaitu adanya beberapa perubahan pada kegiatan yang harus direvisi dari pemotongan anggaran tersebut. Adanya revisi DIPA dengan pengurangan anggaran dari DIPA dengan pagu sebesar Rp. 20.857.380.000,00 (Dua Puluh Miliar Delapan ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) menjadi DIPA dengan pagu sebesar Rp. 16.689.224.000,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan Revisi ke 1 sehingga dalam serapan anggaran mengalami hambatan karena perlu adanya perubahan POK atau ADK dalam aplikasi SAIBA.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Karawang Nomor : 121/KU.010/C.8/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Karawang, yaitu :

Pejabat Pembuat Komitmen . : Yoshi Futaki, SIP.

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Ir. Bambang Kuncoro, M.M

Bendahara Pengeluaran : Oya Kusmaya

Bendahara Penerimaan : Fitrah Rahmatullah

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 LAPORAN SAIBA
- 2 LAPORAN SIMAK-BMN
- 3 BUKTI SETOR UP-TUP
- 4 BUKTI SETOR SSBP/PNBP
- 5 BUKTI SURAT PEMBUKAAN REKENING BENDAHARA
- 6 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
(LPJB)
- 7 REKENING KORAN BULAN DESEMBER 2017
- 8 DIPA
- 9 HASIL REVIU
- 10 HASIL TELAAH
- 11 BAR PNBP
- 12 BAR REKON KPPN